

## PERGESERAN IDEOLOGI POLITIK ISLAM DI INDONESIA

**Moch. Muwaffiqillah**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
wafiqmuhammad@iainkediri.ac.id

### **Abstract**

*As a way of looking at the world, ideology must at certain times collide with the fact of its inability to understand and direct reality. When that happens, it could be that ideology then revises itself to be compatible with empirical facts, although some ideologies don't do that. But there are some ideologies that are later abandoned by their followers. Dissatisfaction with the failure of ideology in understanding and directing reality is the main factor in the ideological shift. How did this shift in political ideology occur? What are the considerations for individuals and groups to switch to other ideologies? And what is the relevance of this study for shifts in Islamic political ideology in Indonesia? Some of these questions will be parsed in the following review articles*

**Keywords:** *Ideology, Politic, Islam.*

### **Pendahuluan**

Sebagai sebuah cara pandang terhadap dunia, ideologi pada saat tertentu harus terbentur oleh fakta atas ketidakmampuannya dalam memahami dan mengarahkan realitas. Pada saat itu terjadi, bisa jadi ideologi yang kemudian merevisi diirinya agar kompatibel dengan fakta empirik, meskipun beberapa ideologi tidak melakukan hal itu. Tetapi ada beberapa ideologi yang kemudian ditanggalkan oleh para pengikutnya. Ketidakpuasan atas kegagalan ideologi dalam memahami dan mengarahkan realitas adalah faktor utama terjadinya pergeseran ideologi atau *ideological shift*.

Bagaimana pergeseran ideologi politik itu terjadi? Apa saja yang menjadi pertimbangan individu dan kelompok mengalihkan pada ideologi yang lain? Dan bagaimana relevansi kajian tersebut bagi pergeseran ideologi politik Islam di Indonesia? Beberapa pertanyaan tersebut yang hendak diurai dalam review artikel berikut ini.

### **Muasal Ideologi**

Pada awalnya istilah ideologi muncul dan dikenalkan oleh Destutt de Tracy dalam kajian epistemologis (terlebih dalam kajian epistemologi idealisme) dan tidak dalam pengertian salah satu instrumen politik. De Tracy menyebutnya sebagai Ilmu tentang gagasan-gagasan (*The Science of Ideas*). Berikutnya istilah ini muncul kedua kalinya di tangan Napoleon Bonaparte yang mendefinisikan Ideologi adalah seperangkat nilai yang digunakan untuk menggerakkan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Ia menyebut kelompok ini sebagai kaum ideolog. Seterusnya muncul ketiga kalinya di tangan Karl Marx dalam bukunya *The German Ideologi*, kali ini Marx mendefinisikan ideologi sebagai imajinasi utopis dari sekelompok borjuis yang berusaha melanggengkan kekuasaannya.

Istilah ideologi ini mengacu pada sistem gagasan yang dapat digunakan untuk merasionalisasikan, memberikan teguran, memaafkan, menyerang, atau menjelaskan keyakinan, kepercayaan, tindak, atau pengaturan kultural tertentu.<sup>1</sup> Dengan demikian ketika kita mendengar tentang sebuah gagasan yang bersifat ideologis maka hal itu bermakna bahwa gagasan tersebut bersifat partisan, tidak terlalu obyektif melainkan disusun untuk mendukung (atau menyerang) suatu misi atau gagasan tertentu. Sehingga dengan demikian terjadi postulasi terhadap realitas untuk mendukung gagasan tersebut. Pendeknya, para ideolog seringkali mencocokkan fakta demi mendukung gagasan ideologisnya dan bukan membenahi sistem gagasannya sendiri manakala fakta menghendaki demikian.

Pengertian ideologi adalah suatu sistem nilai atau kepercayaan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Sedangkan ciri-ciri ideologi tersebut adalah bahwa ia merupakan cita-cita yang dalam dan luas, bersifat jangka panjang, dalam beberapa hal bersifat universal atau setidaknya “dianggap” universal.

Ideologi ini pada tataran berikutnya menjadi sumber aksi politik. Gagasan-gagasan ini berikutnya bisa membentuk kebijakan umum dalam program-program pemerintah yang

---

<sup>1</sup> David Kaplan dan Albert A. Manners, *Teori Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) 154.

berkuasa, bisa juga dipakai untuk menumbangkan pemerintahan-pemerintahan yang sedang berkuasa.

Dari sini kemudian ideologi bermakna sebagai pandangan dunia (*World view*) yang dengan ini manusia mempersepsikan realitas baik sosial politik maupun agamanya. Tak seorangpun yang mampu mempersepsikan dunia menjadi apa adanya, sehingga realitas senantiasa terbentuk melalui sistem kognisi imajinatif dalam sistem ideasional manusia. Realitas kemudian adalah sebetuk interpretasi yang sudah disaring melalui sistem kognisi imajinatif tersebut. Kehendak untuk menelanjangi dunia menjadi apa adanya sama dengan membongkar sistem pemikiran manusia yang sudah terkonstruksi oleh bangunan sosial politik dan agamanya melalui pola sosialisasi sejak kelahirannya. Dengan demikian bukanlah manusia pada umumnya yang berfikir, melainkan manusia dalam kelompok-kelompok tertentu yang telah mengembangkan suatu gaya pemikiran tertentu dalam rangkaian tanggapan terus menerus terhadap situasi-situai khusus tertentu yang mencirikan posisi umum mereka.<sup>2</sup>

Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu masyarakat, dan mengerti cara-cara yang paling dianggap baik untuk mencapai tujuan. Tujuan dan cara itu secara moral dianggap paling baik dan adil bagi penghayanya untuk mengatur perilaku social warga masyarakat dalam berbagai segi kehidupan ini.<sup>3</sup>

### **Pergeseran Ideologi: Landasan Teoritik**

*Ideological shift* yang diajukan oleh penulis adalah pengembangan dari *paradigm shift* yang lumrah dalam perbincangan filsafat ilmu ala Kuhn. Dalam konteks Kuhnian, *paradigm shift* berkait erat dengan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.

Pra paradigma – Pra ilmu – Paradigma-Normal Science – Anomali-Krisis – Revolusi-Paradigma Baru-Ekstra ordinary Science – Anomali- Krisis – Revolusi.

---

<sup>2</sup> Karl Manheim, *Ideologi dan Utopia* 1991, 3

<sup>3</sup> Ramlan surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).

Dalam pandangan penulis artikel yang dibahas ini, ideologi pada tataran tertentu juga mengalami anomali, satu keadaan ‘kacau’, keganjilan, ketidaksepakatan dan penyimpangan yang dialami oleh ideologi. Hal ini persis seperti yang terjadi dalam wilayah *normal science*, seringkali ada permasalahan yang tidak terselesaikan dan banyak diantaranya amat penting menurut asumsi ilmuwan. Yang pada akhirnya akan muncul keganjilan, ketidaksepakatan dan penyimpangan dari hal-hal yang biasa. Maka oleh Kuhn situasi ini disebut anomali. Jika anomali semakin banyak, hingga suatu komunitas ilmiah mengumpulkan data-data yang tidak sejalan dengan pandangan paradigma mereka, serta mulai mempersoalkan kesempurnaan paradigmanya, maka semenjak itu ilmu tersebut masuk dalam masa krisis.

### **Pergeseran Ideologi bagi Individu**

Artikel yang berjudul “Political ideological shift: A theoretical approach” yang ditulis oleh François Facchini dari Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, France, mengisahkan pergeseran ideologis yang berlangsung pada level mikro atau individu. Artikel ini dimulai dengan Rasionalisasi. Rasionalisasi adalah kebiasaan pikiran. “Kebiasaan ini terdiri dari menghibur diri kita sendiri dan membuat orang lain terkesan dengan menarik gambaran diri kita sendiri, motif kita, teman kita, musuh kita, panggilan kita, gereja/masjid kita, negara kita, yang mungkin lebih berkaitan dengan apa yang kita sukai daripada apa adanya. Proses ini disebut dengan *self-defence mechanism*. Rasionalisasi, *ex post*, membenarkan sebuah keputusan. Hal ini seperti memberikan kepastian mengenai pilihan yang dibuat dan karenanya harus dibedakan dari rasionalisasi *ex ante*.

Dari perspektif kognitif inilah teori yang dikembangkan dalam artikel ini menjelaskan pergeseran ideologis. Ide utamanya adalah sebagai berikut. Suatu peristiwa menghasilkan disonansi kognitif, yang pada gilirannya memicu kenaikan biaya untuk menjustifikasi ideologi tertentu. Hal ini terjadi karena ideologi adalah sistem justifikasi bagi representasi kita. Sumber muasalnya adalah tindakan persepsi. Melalui indera mereka, orang belajar tentang lingkungan mereka dan mengumpulkan pengetahuan, mereka hafalkan dan mereka simpulkan, yang memungkinkan mereka untuk memprediksi sejumlah peristiwa tertentu.

Bahasa menambah pola kognitif ini dan mentransmisikan apa yang telah dilihat dan diorganisasikan oleh semua orang ke dalam sistem representasi yang koheren. Dalam pengertian ini, sebuah ideologi lebih dari sekedar keyakinan.

Yang masuk akal dari perubahan ini adalah sebagai berikut. Penyebab tindakan bagi perubahan ideologis adalah sebuah peristiwa. Peristiwa adalah sesuatu yang menciptakan diskontinuitas dalam kehidupan individu (penyakit, kelahiran, kematian, kegagalan, pernikahan, dll.) Atau dalam kehidupan komunitas (perang, revolusi, bencana alam, krisis ekonomi, dll.). Semua itu menciptakan ancaman baru dan cenderung mendiskreditkan ideologi yang sudah mapan. Mereka menciptakan peluang untuk perubahan dan untuk bereksperimen dengan cara-cara baru untuk melihat dan bereaksi terhadap dunia.

Suatu peristiwa memberikan informasi yang menempatkan individu dalam situasi disonansi kognitif. Peristiwa ini menciptakan disonansi bagi seseorang atau bagi masyarakat. Runtuhnya sejumlah besar bisnis selama periode krisis telah melibatkan hampir semua orang. Hal ini mendikte kepedulian kolektif, karena krisis menciptakan disonansi sosial. Berikutnya ia memaksa perdebatan untuk membahas alasan yang mendasari dan cara-cara untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, peristiwa besar adalah peristiwa yang menciptakan disonansi sosial, yang memaksa perdebatan dan penilaian ulang sistem pembenaran untuk ideologi dalam operasi. Selanjutnya menciptakan kondisi untuk perubahan ideologi saat ini dan keseimbangan kekuasaan mereka.

### **Konteks justifikasi dan sifat dari peristiwa yang mendukung**

Ideologi adalah apa yang membenarkan penilaian kita tentang nilai dan fakta, serta konteks justifikasi kita. Konteks justifikasinya adalah epistemologi yang menjadi akar semua pengetahuan moral dan faktual yang ditemukan di semua ideologi. Epistemologi suatu ideologi adalah struktur logis internal dari pengetahuan yang dimobilisasi untuk membenarkan representasi realitas dan tatanan dunia yang adil.

Ideologi politik dapat ditemukan pada rasionalisme atau empirisme. Empirisme adalah basis ideologi ilmiah. Ia memiliki dua premis utama. Yang pertama adalah



pengetahuan saya berasal dari eksperimen saya. Yang kedua adalah pengetahuan merupakan generalisasi situasi tertentu. Empirisme adalah pandangan bahwa pertanyaan pembenaran hanya dapat dipertimbangkan dalam hal observasi dan eksperimen.

Sebaliknya rasionalisme mendasarkan pengetahuan manusia hanya pada alasan diskursif. Alasan ini selanjutnya didukung oleh pernyataan kata-kata Allah kepada para nabi dalam rasionalisme agama. Ini adalah satu-satunya alasan yang mampu memahami dunia dan secara moral menilainya dalam rasionalisme sekuler. Solusi untuk masalah ini logis dan non-eksperimental.

Oleh karena itu, konteks pembenaran menentukan sifat dari peristiwa yang akan membuat sebuah ideologi menjadi problematis: faktor signifikansi dalam konteks pembenaran empiris, inkonsistensi logis dalam konteks pembenaran rasionalis dan inkonsistensi interpretatif dalam konteks pembenaran teologis.

Ideologi politik yang didirikan pada rasionalitas wahyu pada dasarnya terdiri dari pengetahuan teologis. Apa yang penting untuk membenarkan cara dunia ini dan seharusnya adalah pengetahuan saya tentang kata-kata Tuhan. Dunia adalah ciptaan Tuhan. Penilaian saya atas fakta dan nilai didasarkan pada iman dan firman Allah ini. Ideologi politik yang berdasarkan pada konteks justifikasi empiris, memungkinkan lebih banyak ruang untuk pengalaman. Seseorang pada akhirnya dapat menolak etika dasar dan memprioritaskan penilaian fakta semata. Konteks pembenaran untuk masing-masing ideologi menentukan model pemikirannya yang ideal dan sifat pengetahuan yang diterima sebagai benar.

Apa yang problematik dalam konteks pembenaran empiris tidak bermasalah dalam konteks pembenaran teologis atau rasionalis. Sebaliknya sebuah ideologi agama murni didasarkan pada iman dalam wahyu. Dunia yang lebih baik adalah dunia di mana orang bertindak sesuai dengan hukum Tuhan.

### **Perubahan dan biaya justifikasi**

Dengan ideologi yang dicirikan dengan cara ini oleh konteks pembenarannya dan isinya, penilaian fakta dan penilaian nilai, kita dapat mencoba menjelaskan alasan mengapa

ia berubah. Lalu, apa yang menyebabkan agen merevisi konteks pembenaran untuk ideologi dan isinya?

Jawabannya adalah sebagai berikut. Seseorang mengubah dasar tindakannya sesuai dengan biaya justifikasi pilihan mereka. Mereka memiliki pilihan antara mempertahankan ideologi mereka (opsi A) atau mengubahnya (opsi B). Ada keuntungan untuk setiap solusi. Jika individu memilih opsi B, itu karena keuntungan yang terkait dengannya dianggap lebih tinggi dari opsi A. B dipilih karena memiliki biaya peluang yang lebih rendah. Individu hanya melepaskan keuntungan dari opsi A jika mereka kalah dengan keuntungan dari opsi B. Menimbang keuntungan membutuhkan individu untuk membenarkan pembenaran mereka. Keuntungan opsi B lebih unggul daripada keuntungan opsi A karena beberapa alasan. Biaya pembentukan alasan mereka untuk bertindak adalah biaya pembenaran. Saya memilih B daripada A karena lebih murah untuk mempertahankan opsi B daripada opsi A. Pemilihan perubahan ideologis karena itu tergantung pada dunia kemungkinan ideologis dan tingkat biaya peluang untuk setiap opsi.

### **Pilihan dan dunia kemungkinan ideologis**

Konsep biaya peluang (*opportunity cost*) menyiratkan bahwa memilih melibatkan memberikan sesuatu. Jika saya memilih untuk tetap liberal, saya mengesampingkan manfaat dari semua ideologi alternatif. Inilah sebabnya solusi yang dipilih oleh individu tertentu tergantung pada solusi yang dibayangkan (*imagined solutions*), yaitu solusi dari dunia saya tentang kemungkinan ideologis. Dalam hal ini, status quo ideologis dijelaskan oleh terbatasnya sifat kemungkinan dunia ideologis saya atau dengan cara saya menilai keuntungan dari alternatifnya. Misalkan saya tetap liberal meskipun krisis tahun 1929 karena saya tidak mengerti sosialisme (ketidaktahuan) atau karena saya menganggap keuntungan sosialisme lebih rendah daripada liberalisme, meskipun krisis. Sebuah dunia dengan kemungkinan ideologi yang terbatas dapat menjelaskan tidak adanya perubahan.

### **Pilihan dan biaya peluang**

*Status quo* ideologis juga dapat dijelaskan oleh fakta bahwa solusi yang tersedia lebih mahal untuk dibenarkan daripada ideologi awal. Solusi yang dipilih oleh individu adalah salah satu ideologi yang mereka bayangkan. Jika dipilih, itu karena dianggap sebagai yang terbaik. Ini dianggap yang terbaik karena itu adalah solusi yang lebih murah untuk dibenarkan. Tiga faktor mempengaruhi total biaya ini: jumlah orang yang telah memilih untuk merevisi ideologi mereka, pendapat para ahli dan jumlah pengetahuan yang dimiliki oleh mereka yang membela revisi ideologi.

*Biaya justifikasi dan ukuran kelompok.* Biaya pembenaran untuk ideologi tertentu lebih rendah jika semakin banyak jumlah orang yang mengadopsinya.

*Biaya justifikasi dan argumen otoritatif.* Biaya pembenaran dari ideologi tertentu juga tergantung pada pendapat para ahli.

*Biaya justifikasi dan pengetahuan.* Biaya pembenaran juga bergantung pada pengetahuan yang tersedia. Pengetahuan adalah jumlah semua pernyataan yang dianggap tidak bermasalah.

Kualitas intrinsik sebuah ideologi adalah kemampuannya untuk membuat keseluruhan yang koheren dari semua pernyataan non-problematik yang dijunjung oleh sekelompok individu. Dalam kondisi ini, ideologi dominan adalah ideologi yang paling menghargai pengetahuan bersama kelompok. Stabilitas suatu ideologi bergantung pada hubungannya dengan ide-ide baru dan kebebasan berekspresi. Beberapa ideologi, dalam pengertian ini, lebih fleksibel daripada yang lain. Oleh karena itu ideologi lebih stabil ketika menekankan masa lalu di masa kini, dan dapat meminimalkan konfrontasi ideologis. Dengan demikian akan mengurangi munculnya situasi disonansi sosial; akan ada ideologi yang dirancang untuk berubah dan ideologi yang dirancang untuk tetap statis. Ini menunjukkan bahwa perubahan ideologis bergantung pada nilai masing-masing atribut ideologi terhadap kemampuan adaptasi sistem perwakilannya. Sebuah ideologi yang memiliki pandangan tradisional tentang kebenaran tunggal, yang tidak berubah akan kurang lunak daripada ideologi berdasarkan filsafat evolusionis pasca-Darwinian.



## **Membaca Pergeseran Ideologi Islam dalam Demokrasi di Indonesia**

Di dunia terkini telah muncul kecenderungan dan minat yang sangat kuat terhadap demokrasi. Dan inilah yang mendorong hampir semua rezim negara-negara berkembang untuk melakukan reformasi politik dan penyesuaian-penyesuaian terhadap tuntutan yang terus meningkat. Walaupun beberapa rezim lebih memprioritaskan keamanan daripada demokrasi, mereka tetap menggunakan demokrasi sebagai retorika politik untuk mencari legitimasi. Karenanya, beberapa rezim yang otoritarian di negara berkembang tetap mengklaim pemerintahannya sebagai penganut sistem demokrasi atau setidaknya sedang dalam proses ke arah itu.<sup>4</sup>

Dalam sejarah pemikiran Islam, setidaknya terdapat tiga tipologi dalam melihat hubungan antara Islam dan Negara dari sudut pandang teologis-politis. *Pertama*, Pemikiran politik Islam organik tradisional. Pemikiran ini berkeyakinan bahwa Islam adalah agama sekaligus negara (*din wa daulah*). Islam adalah agama yang sempurna, dan antara Islam dengan negara merupakan dua entitas yang menunggal. *Kedua*, aliran pemikiran politik Islam sekuler, dalam perspektif ini Islam adalah agama yang tidak berbeda dengan agama lainnya di muka bumi ini di mana ia hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, dan tidak mengajarkan tatacara pengaturan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena Islam adalah agama murni dan bukan negara. *Ketiga*, pemikiran politik Islam moderat, aliran ini menolak klaim ekstrim bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur semua urusan termasuk politik tetapi juga menolak klaim ekstrim yang kedua yang melihat bahwa Islam tidak berkaitan sama sekali dengan politik.<sup>5</sup>

Di Indonesia, misalnya, bertumbuh-kembangnya demokrasi dengan segala tautan yang mengirinya telah menghasilkan gagasan demokrasi yang beragam. Relasi agama dan demokrasi ini dipetakan dengan sangat piawai oleh Lutfi Assyaukanie dengan tiga kategori

---

<sup>4</sup> Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman* (Jakarta: LP3ES, 1995), 3.

<sup>5</sup> Sukron Kamil "Peta Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer" dalam *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 3 No. 1, September 2003, 63-76; bandingkan dengan Din Syamsudin, "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Ulumul Qur'an*, No.2 Vol.IV tahun 1994, 6

utama yakni; 1. Negara Demokrasi Islam, 2. Negara Demokrasi Agama, dan 3. Negara Demokrasi Liberal.<sup>6</sup>

Yang pertama muncul dari kalangan pengusung negara Islam. Kelompok ini diwakili oleh tokoh-tokoh yang bergabung dalam Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Mereka antara lain adalah M. Natsir, Zainal Abidin Ahmad, Mohamad Roem, Abu Hanifah, Hamka, dan Muhammad Rasjidi. Luthfi Assyaukanie menyebut model ini sebagai Negara Demokrasi Islam (NDI).

Kelompok ini mengusung gagasan negara Islam, tapi negara yang mereka bayangkan sebagai model bukanlah Pakistan, Iran, apalagi Arab Saudi, melainkan Belanda, Swedia atau Inggris. Bagi kelompok ini gagasan negara Islam tidak sama sekali bertentangan dengan demokrasi.

Yang kedua adalah Negara Demokrasi Agama (NDA). Kelompok ini didukung oleh tokoh-tokoh semacam Amin Rais, Syafi'i Ma'arif, Kuntowijoyo, Dawam Rahardjo, Sahal Mahfudz, Ali Yafie, Achmad Siddiq, Munawir Syadzali, dan Adi Sasono. Pada intinya mereka tidak berkehendak untuk mewujudkan negara Islam, tapi mereka juga berjuang agar hak yang sama diberikan bagi semua agama untuk menginspirasi negara. Mereka juga menentang pemisahan negara dan agama seperti kelompok pertama. Namun kesatuan agama dan negara tersebut manifestasinya lebih banyak pada UU yang bersifat keagamaan.

Yang ketiga adalah Negara Demokrasi Liberal (NDL). Model ini terutama diusung oleh tokoh-tokoh Muslim seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, dan Harun Nasution. Kelompok ini secara tegas mendukung gagasan sekularisme. Bagi mereka, negara adalah institusi rasional yang juga harus dikelola dengan menggunakan kalkulasi rasional.

Dalam konteks demokrasi yang ketiga tersebut, demokrasi yang sebenar-benarnya nampaknya membutuhkan sekularisme di dalamnya. Apalagi dunia yang sedang dijalani

---

<sup>6</sup> Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Freedom Institute, 2011). 18-24.

oleh umat manusia hari ini sedang bergerak menuju pada proses sekularisasi. Dalam konteks global, dunia yang tersekulerkan telah memaksa banyak pihak untuk menata ulang posisinya, termasuk kalangan pemikir Islam. Sekularisasi telah melahirkan kesimpulan yang simple yaitu modernisasi telah meyebabkan merosotnya agama, baik dalam ranah sosial maupun individual. Hal itu terjadi karena modernisasi telah melahirkan keperkasaan sekularisme di seluruh tempat. Tapi menurut Peter L. Berger, pada saat yang sama modernisasi sendiri telah membangkitkan gerakan sekularisasi tandingan yang kuat (*powerful movements of counter-secularization*). Selain itu sekularisasi pada level masyarakat, sesungguhnya tidak berimbang pada sekularisasi pada level kesadaran individu.<sup>7</sup>

Noris dan Inglehart<sup>8</sup> dalam bukunya *Sacred and Secular* mengajukan beberapa hipotesis berkaitan tentang sekularisasi yang melanda dunia yang kemudian dibuktikan kebenarannya oleh mereka. Hipotesis pertama, *hipotesis nilai-nilai keagamaan* yang berbunyi pengalaman yang tumbuh dalam masyarakat-masyarakat yang kurang aman akan memperkuat pentingnya nilai-nilai keagamaan, dan sebaliknya pengalaman dalam kondisi yang lebih aman akan memperlemah pentingnya nilai-nilai tersebut. Kedua, *hipotesis budaya keagamaan* yang mengandaikan bahwa tradisi budaya keagamaan yang dominan dalam masyarakat akan meninggalkan suatu jejak yang khas pada keyakinan moral dan sikap sosial yang tersebar luas dikalangan publik. Ketiga, *hipotesis partisipasi keagamaan* yang mengandaikan bahwa kemerosotan terbesar dalam partisipasi keagamaan akan terjadi dalam masyarakat yang makmur dan aman di mana arti penting agama paling terkikis. Keempat, *hipotesis keterlibatan kewargaan* yang memaklumkan bahwa partisipasi keagamaan reguler akan mendorong keterlibatan politik dan sosial dan juga dukungan pemilih bagi partai-partai keagamaan. Kelima, *hipotesis demografis* yang menggambarkan bahwa masyarakat yang kaya menjadi lebih sekuler namun dipihak lain jumlah populasinya menurun. Sebaliknya masyarakat di negara miskin tetap religius namun jumlah

---

<sup>7</sup> Peter L. Berger, "Desekularisasi Dunia: Tinjauan Global" dalam Peter L. Berger (ed.) *Kebangkitan Agama Menantang Politik Dunia*. ter. Hasibul Khoir (Yogyakarta: Arruzz, 2003), 18.

<sup>8</sup> Pippa Norris dan Inglehart, *Sacred and Scular* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

penduduknya meningkat tajam. Keenam, *hipotesis pasar keagamaan* yang mengklaim bahwa pluralisme keagamaan dan kebebasan keagamaan yang lebih besar akan meningkatkan partisipasi keagamaan.

Noris dan Inglehart menyajikan penelitian penting berkenaan dengan hubungan antara agama dan politik yang disajikan melalui *angel* sekularisasi. Noris dan Inglehart dengan sangat luar biasa membongkar asumsi-asumsi dan teori tentang sekularisasi yang selama ini nyaris menjadi ‘agama’ baru bagi ilmuwan sosial. Bagaimana tidak, teoritis besar seperti Durkheim, Weber, bahkan Marx telah memprediksi akhir dari agama.<sup>9</sup>

Dalam batas minimum, sekularisme dipahami sebagai pemisahan yang jelas namun tidak ditetapkan antara agama dan pemerintahan. Meski sekularisme berakar dari tradisi Eropa, hal ini tidak berarti menjadi tunggal. Ada lebih dari satu sejarah sekularisme politik, dan beragam modelnya telah muncul dari masa ke masa, yang pada dasarnya berkisar di antara versi lemahnya, yang hanya menuntut pemisahan agama dan negara, dan versi kuatnya yang menuntut pemisahan jelas antara agama dan politik. Kedua versi berbeda dari sekularisme politik ini disebut “Sekularisme Anglo-Amerika” dan “Sekularisme Republik Prancis”. Kedua model sekularisme ini adalah hasil sampingan dari sejarah unik dari hubungan gereja-negara dan pengalaman *nation-building* dari negara-negara ini setelah melalui periode panjang eksperimentasi, sering dibarengi kekerasan, konflik dan perdebatan sengit.<sup>10</sup>

Dalam perspektif teoritik yang dikembangkan dari artikel “Political ideological shift, A theoretical approach” karya François Facchini kita membaca beberapa pergeseran ideologi yang ditopang oleh tiga hal utama yakni *Biaya justifikasi dan ukuran kelompok*. Biaya pembenaran untuk ideologi tertentu lebih rendah jika semakin banyak jumlah orang yang mengadopsinya. *Biaya justifikasi dan argumen otoritatif*. Biaya pembenaran dari ideologi tertentu juga tergantung pada pendapat para ahli. *Biaya justifikasi dan pengetahuan*. Biaya

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Nader Hashemi, *Islam, Sekularisme dan Demokrasi Liberal: Menuju Teori Demokrasi dalam Masyarakat Muslim*, terj. Aan Rukmana dan Sofwan al Banna Choiruzzad (Jakarta: Gramedia, 2011).

pembenaran juga bergantung pada pengetahuan yang tersedia. Pengetahuan adalah jumlah semua pernyataan yang dianggap tidak bermasalah.

### Penutup

Layaknya pengetahuan yang paradigma ilmu pengetahuan yang beroperasi lewat paradigma Kuhnian, hal yang sama juga berlakukpada ideologi. Krisis yang dalam bahasa Kuhn disebut anomali bisa menghampiri ideologi dan mengakibatkan keterpurukannya. Setelah itu ideological shift tinggal menunggu waktunya, tentu dengan segala syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks memahami pergeseran ideologi politik Islam di Indonesia barangkali kajian yang lebih detil dan empirik dibutuhkan agar makna pergeseran menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Misal yang dikembangkan dengan mengacu pada tulisan Lutfi Assyaukani hanya untuk menyelaraskan pendekatan teoritik dengan yang historik.

### Daftar Pustaka

- David Kaplan dan Albert A. Manners, *Teori Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Din Syamsudin, "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Ulumul Qur'an*, No.2 Vol.IV tahun 1994.
- Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia* 1991
- Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Freedom Institute, 2011.
- Nader Hashemi, *Islam, Sekularisme dan Demokrasi Liberal: Menuju Teori Demokrasi dalam Masyarakat Muslim*, terj. Aan Rukmana dan Sofwan al Banna Choiruzzad. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Peter L. Berger, "Desekularisasi Dunia: Tinjauan Global" dalam Peter L. Berger (ed.) *Kebangkitan Agama Menantang Politik Dunia*. ter. Hasibul Khoir. Yogyakarta: Arruzz, 2003.
- Pippa Norris dan Inglehart, *Sacred and Secular* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004.





Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.

Sukron Kamil “Peta Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer” dalam *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 3 No. 1, September 2003, 63-76;

Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*, Jakarta: LP3ES, 1995.